

Dipublikasikan pada 6 November 2018



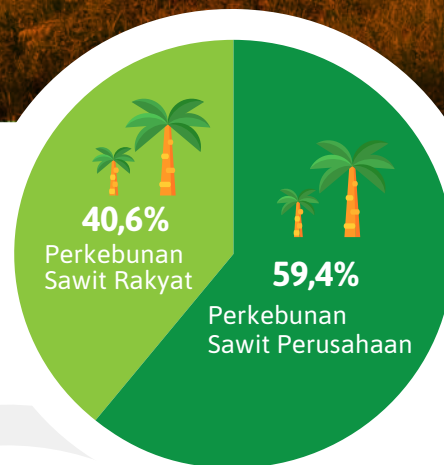
KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND



Information Brief

Model Desa untuk Pengelolaan Sawit Rakyat: Upaya menuju ISPO

Direktorat Jenderal Perkebunan (2017) memperkirakan luas perkebunan sawit rakyat di tahun 2018 mencapai 5.807.514 Ha atau 40,6 persen dari total 14.309.256 Ha perkebunan kelapa sawit nasional. Dengan kontribusi luasan yang cukup besar, perkebunan sawit rakyat berperan penting dalam menjamin terwujudnya industri sawit berkelanjutan di Indonesia. Dalam hal ini desa diharapkan dapat mendorong perbaikan sawit rakyat menuju sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).



Gambar 1. Rasio Luas Perkebunan Sawit Perusahaan & Rakyat.
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2017)

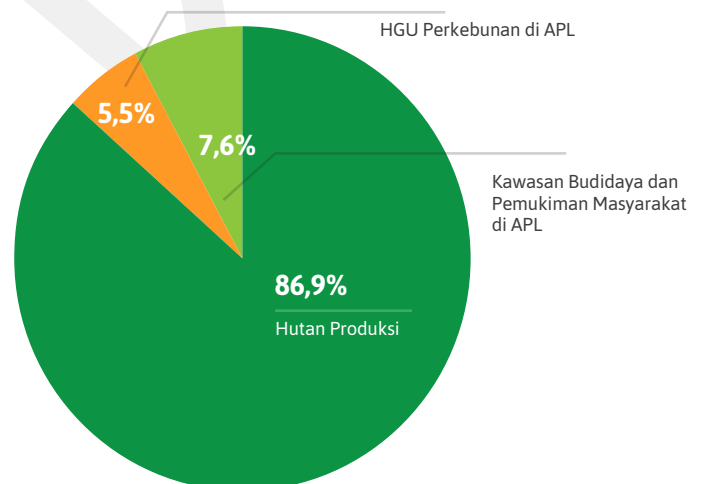
Kondisi Sawit Rakyat di Desa Tepian Buah dan Labanan Makmur, Kalimantan Timur

Tata ruang desa

Desa Tepian Buah, telah memiliki batas dan luasan desa definitif sejak tahun 2016, yakni 16.558,76 Ha. Dari hasil digitasi citra drone oleh AURIGA (2018), alokasi lahan Desa Tepian Buah di tahun 2018 adalah 14.360 Ha kawasan Hutan Produksi, 916 Ha Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Areal Penggunaan Lain (APL), 1.146 Ha APL untuk kawasan budidaya masyarakat, dan 112 Ha APL untuk kawasan pemukiman. Kawasan budidaya dan pemukiman inilah ruang gerak masyarakat, yang diperkirakan sekitar 7.6% dari total luasan desa yang memiliki jumlah penduduk 987 jiwa, terdiri atas 240 Kepala Keluarga (KK). Populasi ini terus meningkat setiap tahunnya dan telah menciptakan kompetisi kepemilikan lahan antar masyarakat desa.

Kurangnya lahan APL yang tersedia untuk kegiatan ekonomi masyarakat mendorong pembukaan lahan garapan dalam kawasan Hutan Produksi. Di tahun 2018, dari total luasan kawasan Hutan Produksi di Desa Tepian Buah, sebesar 2.507 Ha telah digarap oleh masyarakat. Lahan garapan tersebut digunakan untuk

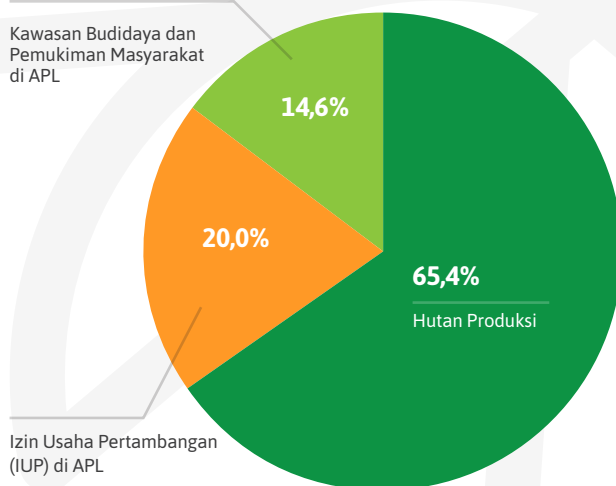
menanam sawit seluas 730 Ha dan sisanya 1.777 Ha untuk berbagai jenis tanaman pertanian lainnya.



Gambar 2. Alokasi Ruang di Desa Tepian Buah
Sumber: AURIGA (2018)

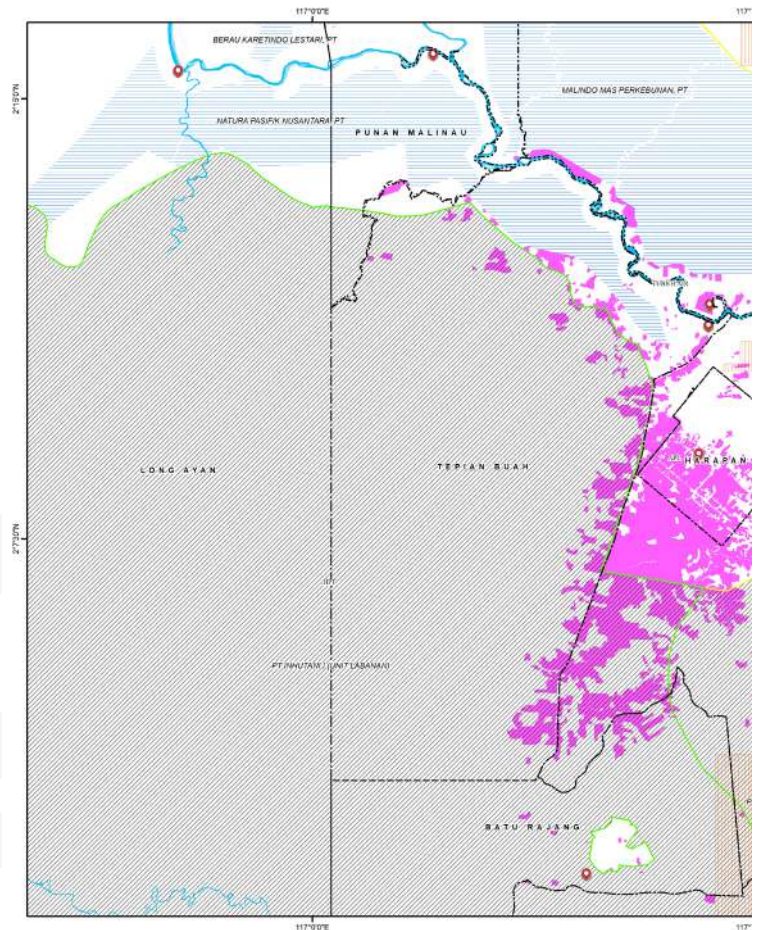
Dari hasil digitasi citra drone oleh AURIGA (2018), **Desa Labanan Makmur**, memiliki luasan indikatif seluas 12.952 Ha. Dari total luasan tersebut, alokasi lahan Desa Labanan Makmur di tahun 2018 adalah 8.470 Ha kawasan Hutan Produksi, 2.591 Ha Izin Usaha Pertambangan (IUP) di APL, 1.892 Ha APL untuk kawasan budidaya dan pemukiman masyarakat. Kawasan budidaya dan pemukiman inilah ruang gerak masyarakat, yang diperkirakan sekitar 14,6% dari total luasan desa. APL tersisa ini dimanfaatkan untuk 3.425 jiwa, terdiri atas 1.200 KK di tahun 2018. Namun, 14,6% kawasan budidaya dan pemukiman tersebut tak juga sepenuhnya dimiliki masyarakat karena keberadaan 370 Ha perkebunan plasma yang dikelola perusahaan perkebunan.

Keterbatasan ruang gerak masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian menyebabkan pembukaan lahan garapan dalam kawasan Hutan Produksi. Di tahun 2018, dari total luasan kawasan Hutan Produksi di Desa Labanan Makmur, sebesar 259 Ha telah digarap sebagai perkebunan sawit oleh masyarakat.

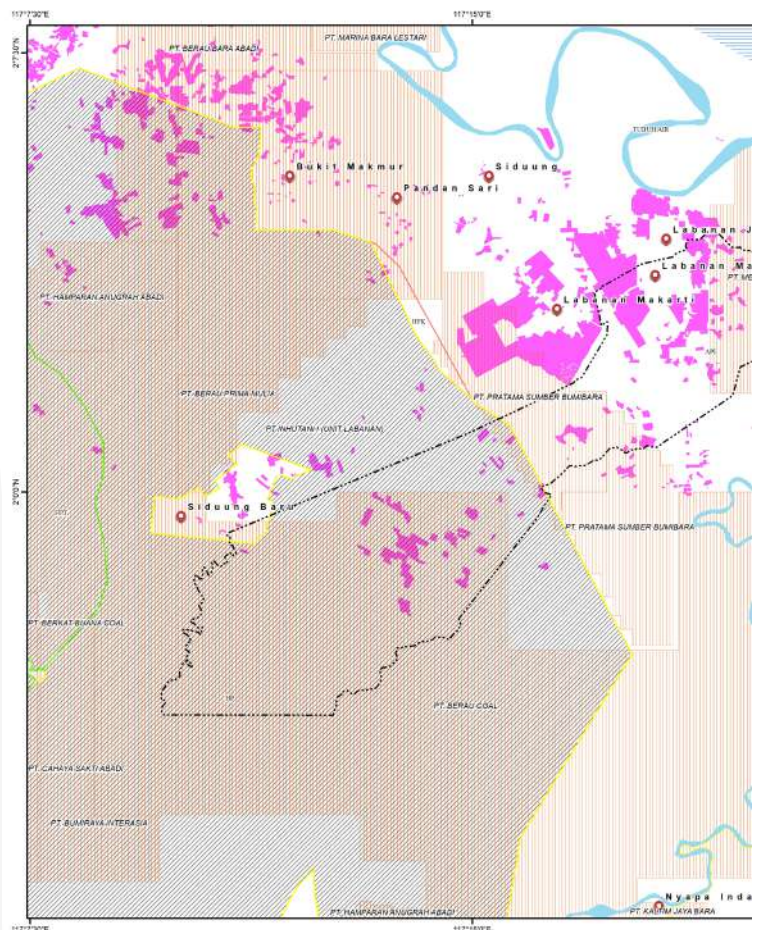


Gambar 3. Alokasi Ruang di Desa Labanan Makmur
Sumber: AURIGA (2018)

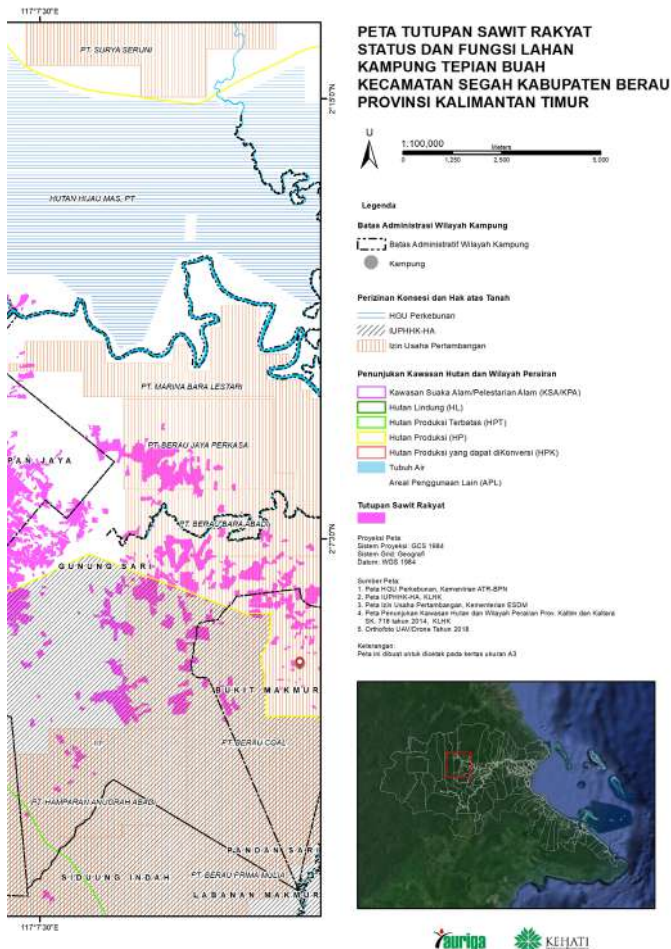
Selama ini **Desa Tepian Buah** dan **Labanan Makmur** tak pernah memiliki peta tata ruang (Desa baru memiliki peta tata ruang di tahun 2018 atas fasilitasi KEHATI dan AURIGA). Tanpa peta tata ruang, keputusan-keputusan penting desa terkait lahan menjadi tidak memiliki dasar sehingga akhirnya sering merugikan masyarakat desa itu sendiri. Keputusan untuk membolehkan pembangunan perkebunan dan pertambangan di APL yang kecil membuat desa semakin krisis lahan.



Gambar 4. Peta Status dan Fungsi Lahan dan Sebaran Sawit Rakyat di Desa Tepian Buah.
Sumber: AURIGA (2018)



Gambar 5. Peta Status dan Fungsi Lahan dan Sebaran Sawit Rakyat di Desa Labanan Makmur.
Sumber: AURIGA (2018)

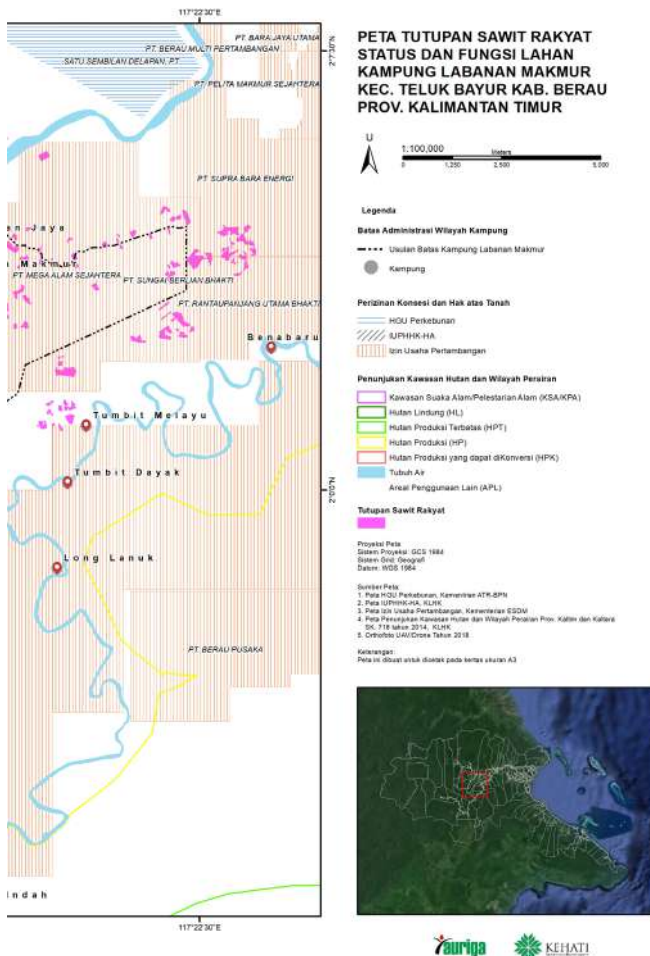


Kelembagaan dan Pengelolaan Usaha Sawit

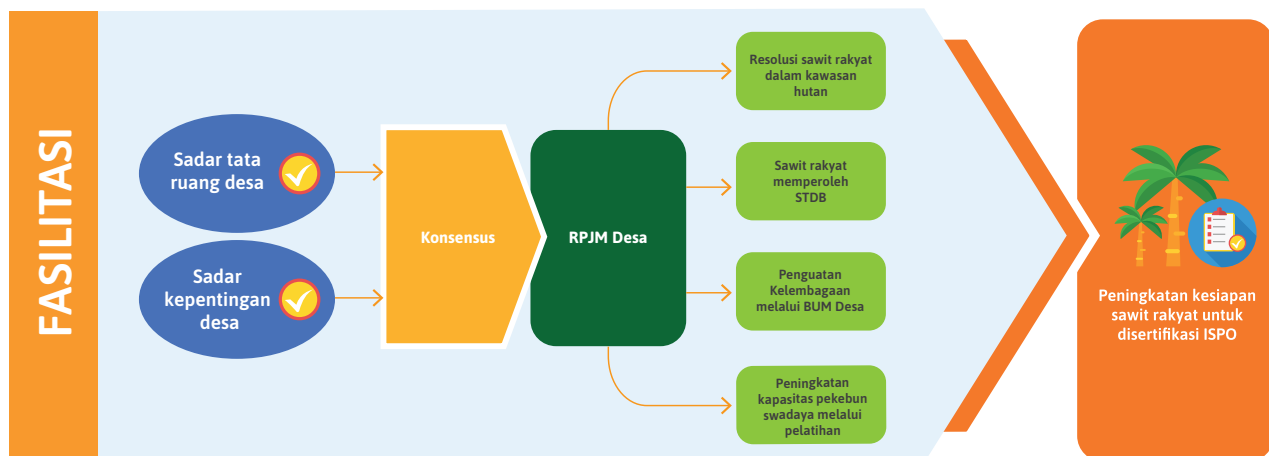
Kelembagaan desa penting untuk meningkatkan kekuatan ekonomi desa yang berkelanjutan dan pro masyarakat. Salah satu bentuk kelembagaan desa dapat dilihat dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa di Tepian Buah dan Labanan Makmur belum terkelola dengan baik sehingga tidak dapat mengakomodir pemasaran Tandan Buah Segar (TBS). Belum efektifnya BUM Desa di desa mengakibatkan pekebun swadaya tidak memiliki pilihan dalam menjual TBS mereka. Selama ini TBS dibeli oleh tengkulak yang menguasai pasar dengan harga yang ditetapkan sebelah pihak. Keberadaan BUM Desa yang menawarkan pembelian TBS dengan standar harga yang baik tentu akan meningkatkan posisi tawar pekebun swadaya dalam jual beli TBS di desa.

Praktik Pertanian Berkelanjutan dan Pengelolaan Lingkungan

Di Desa Tepian Buah dan Labanan Makmur, pengetahuan dan kemampuan pekebun swadaya terkait praktik perkebunan sawit yang baik masih terbatas. Praktik pertanian berkelanjutan yang memperhatikan aturan-aturan seperti penggunaan bibit bersertifikat, pemupukan, pemanenan, dan pemeliharaan kebun masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pekebun swadaya. Selain itu, penerapan praktik perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan pengelolaan lingkungan seperti pembukaan lahan tanpa bakar dan pengolahan limbah juga masih sangat terbatas.



Fasilitasi Desa untuk Pengelolaan Sawit Rakyat



Gambar 6. Model Desa Pengelolaan Sawit Rakyat Menuju Sertifikasi ISPO

Secara umum, melalui berbagai fasilitasi ini diharapkan perkebunan sawit rakyat dapat memenuhi standard sertifikasi ISPO yang penilaiannya mencakup aspek **legalitas, kelembagaan pekebun, kelola lingkungan, dan keberlanjutan usaha**.

Tahap awal fasilitasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tata ruang dan kepentingan desa. Kesadaran masyarakat akan tata ruang dan kepentingan desa dapat mendorong terbentuknya kesepakatan atau konsensus pembangunan desa. Kesepakatan ini terwujud dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2018-2023 yang mengakomodir berbagai permasalahan desa, termasuk isu lahan dan tata kelola ekonomi sawit desa.

Dalam RPJM Desa Tepian Buah dan Labanan Makmur, terdapat beberapa prioritas penting dalam pengelolaan sawit rakyat yang berkelanjutan yaitu:

Resolusi permasalahan agraria dan fasilitasi proses STD-B

Di Desa Tepian Buah fasilitasi dilakukan untuk pengidentifikasian resolusi bagi kebun sawit rakyat dalam kawasan hutan. Skema resolusi yang memungkinkan adalah Reforma Agraria atau Kemitraan melalui Perhutanan Sosial. Sampai dengan akhir Oktober 2018, pendampingan resolusi lahan telah mencapai tahap pengecekan data tiap bidang sawit rakyat oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi yang multi pihak. Kegiatan pengecekan tersebut telah mencakup lahan garapan masyarakat seluas 2.452 Ha dalam kawasan hutan. Terkait kebun sawit rakyat di kawasan APL yang belum terdaftar, fasilitasi diarahkan pada proses perolehan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STDB). Di Desa Tepian Buah telah dilakukan pendataan bidang kebun sawit rakyat di APL yang mencapai luasan 156 Ha. Saat ini, fasilitasi proses perolehan STDB juga telah dimulai di Desa Labanan Makmur.

Penguatan kelembagaan desa

Penguatan kelembagaan desa perlu dilakukan, dalam hal ini perbaikan kelembagaan secara khusus dilakukan terhadap BUM Desa. Perbaikan lembaga ini diharapkan mampu menampung inisiatif baru terkait pemasaran sawit rakyat. Sehingga pekebun swadaya mendapatkan manfaat secara optimal dari proses pemasaran TBS.

Hingga akhir Oktober 2018, BUM Desa di Tepian Buah telah memiliki struktur organisasi baru. Restrukturisasi organisasi BUM Desa diharapkan mampu memperbaiki tata kelola aset dan sumber daya alam desa seperti sawit dan lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

Penerapan praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan

Pelatihan-pelatihan terkait praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan dalam berkebun sawit dilakukan. Manfaat jangka panjang dari praktik pertanian berkelanjutan dipaparkan di setiap pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pekebun swadaya.

Daftar Pustaka

Direktorat Jenderal Perkebunan 2017, 'Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2016-2018', Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.

Seluruh kegiatan fasilitasi ini dilakukan oleh IRE, JAVLEC, dan AURIGA, yang didukung oleh Yayasan KEHATI dan UKCCU.

Peta-peta dalam tulisan ini berasal dari kegiatan digitasi citra drone yang dilakukan oleh AURIGA (2018), yang didukung oleh Yayasan KEHATI dan UKCCU.

Tulisan ini dapat diakses di <http://revampingispo.com/publikasi>